



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH
4 - 6 FEBRUARI 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI

KE PT BRI (PERSERO) TBK

DI PROVINSI JAWA TENGAH (SEMARANG)

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021

Tanggal 4–6 Februari 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertip mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT BRI (Persero) Tbk di zona regional Provinsi Jawa Tengah (Semarang).

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT BRI (Persero) Tbk, terkait peran perseroan ataupun perusahaan tentang Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk di regional Provinsi Jawa Tengah.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah – Semarang ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

1. Kementerian Koperasi dan UKM
2. PT BRI (Persero) Tbk

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah - Semarang adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN	FOTO
1.	A-352	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.	KETUA TIM / FNASDEM	
2.	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	FPDIP	
3.	A-208	dr. H. MUFTI A.N ANAM	FPDIP	
4.	A-161	DARMADI DURIANTO	FPDIP	
5.	A-251	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.	FPDIP	
6.	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	FPDIP	
7.	A-274	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA	FPG	
8.	A-334	Drs. MUKHTARUDIN	FPG	
9.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	FPG	
10.	A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus.,M.M., MBA.	FGERINDRA	
11.	A-115	KHILMI	FGERINDRA	

12.	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	FGERINDRA	
13.	A-374	H. SUBARDI, S.H., M.H.	FNASDEM	
14.	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	FNASDEM	
15.	A-21	Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	FPKB	
16.	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.	FPKB	
17.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	FPD	
18.	A-572	MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU	FPD	
19.	A-447	AMIN, AK, MM.	FPKS	
20.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	FPKS	
21.	A-498	PRIMUS YUSTISIO, S.E.	FPAN	
22.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos.	FPAN	
23.	A-436	ELLY RACHMAT YASIN	FPPP	

F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah – Semarang adalah sebagai berikut :

1. PT BRI (Persero) Tbk

a. Dasar Hukum

Dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) memiliki dasar hukum dari Peraturan menteri Koperasi dan UKM No.6 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM, PKS No. B.1286-DIR/SEI/08/2020 antara BRI dengan Kemenkop UKM tentang penyaluran BPUM dan Surat divisi KPD B.211.e-KPD/KBD/08/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang prosedur penyaluran dan pemenuhan kelengkapan dokumen penerima dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

b. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

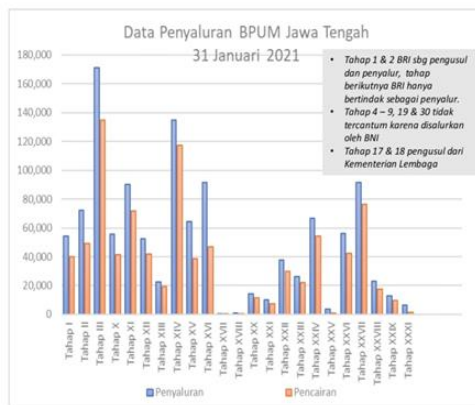
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program stimulus pemerintah berupa tambahan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan kriteria calon penerima warga negara Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

c. Pencairan

Pencairan BPUM diberikan satu kali dalam bentuk saldo rekening simpanan sebesar Rp.2.400.000,-, Dana tersebut telah terbuku pada rekening penerima dan dalam keadaan terblokir dan Pencairan dana BPUM dilakukan oleh penerima bantuan di BRI unit dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

d. Penyaluran BPUM Jawa Tengah

Penyaluran BPUM di Provinsi Jawa Tengah di 31 Januari 2021 di alokasi 1.165.209 penerima dengan anggaran Rp.2,796 T berhasil disalurkan sebanyak 1.158.580 penerima dengan anggaran Rp.2,780 T dan yang sudah melakukan pencairan adalah 875.500 penerima dengan Anggaran Rp.2,036 T. Sebanyak 75,57% BPUM telah cair dari penyaluran 1,1 juta penerima. Tanggal 18 Februari 2021 merupakan batas akhir penyaluran BPUM, target realisasi pencairan mencapai 90% dari para penerima BPUM dan di 30% menjadi target untuk mendapatkan KUR super mikro yang diharapkan dapat berkontribusi membangkitkan perekonomian daerah Jawa Tengah Seperti terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



DATA PENYALURAN BPUM PROVINSI JAWA TENGAH
POSISI 31 JANUARI 2021

Tahap	Tanggal Penyaluran	PENYALURAN		PENCAIRAN 31 Januari	
		PENERIMA	% Penyaluran	PENERIMA	% Pencairan
Tahap I	14 Agustus 2020	54,223	99.98%	40,036	73.84%
Tahap II	22 Agustus 2020	72,111	99.98%	49,097	68.09%
Tahap III	28 Agustus 2020	170,902	98.08%	134,778	78.86%
Tahap X	18 september 2020	55,777	99.36%	41,313	74.07%
Tahap XI	25 September 2020	90,042	98.42%	71,862	79.81%
Tahap XII	05 Oktober 2020	52,359	99.06%	41,638	79.52%
Tahap XIII	05 Oktober 2020	22,467	99.93%	19,275	85.79%
Tahap XIV	06 Oktober 2020	134,780	99.99%	117,494	87.17%
Tahap XV	09 Oktober 2020	64,609	99.88%	38,766	60.00%
Tahap XVI	12 Oktober 2020	91,521	100.00%	46,797	51.13%
Tahap XVII	15 Oktober 2020	459	93.48%	442	96.30%
Tahap XVIII	16 Oktober 2020	759	88.26%	661	87.09%
Tahap XX	04 November 2020	14,158	99.67%	11,518	81.35%
Tahap XXI	12 November 2020	10,273	99.81%	7,338	71.43%
Tahap XXII	18 November 2020	37,617	99.61%	29,737	79.05%
Tahap XXIII	24 November 2020	26,079	99.68%	22,160	84.97%
Tahap XXIV	25 November 2020	66,881	99.83%	54,194	81.03%
Tahap XXV	27 November 2020	3,800	99.97%	1,091	28.71%
Tahap XXVI	02 Desember 2020	55,909	99.74%	42,255	75.58%
Tahap XXVII	07 Desember 2020	91,699	99.90%	76,545	83.47%
Tahap XXVIII	14 Desember 2020	22,958	99.77%	17,432	75.93%
Tahap XXX	14 Desember 2020	12,899	99.76%	9,789	75.89%
Tahap XXXI	15 Desember 2020	6,298	99.97%	1,282	20.36%
GRAND TOTAL		1,158,580	99.43%	875,500	75.57%

Gambar 1.1

Road Map Penyaluran BPUM di Jawa Tengah 31 Januari 2021

Tahap 1 dan 2 BRI sebagai pengusul dan penyalur tahap berikutnya BRI hanya bertindak sebagai penyalur. Tahap 4-9,19 dan 30 tidak tercantum karena disalurkan oleh BNI dan di tahap 17 dan 18 pengusul dari kementerian dan lembaga, Sampai dengan 31 Januari 2021 penyaluran BPUM telah memasuki tahap ke-31.

e. Critical Points Pencairan BPUM

Dilihat dari permasalahan yang ada dilapangan dari beberapa Titik kritis Permasalahan Pencairan BPUM & Upaya Tindaklanjut BRI:

- a) Penyampaian informasi pencairan melalui SMS Blast, *Media Social Campaign* (IG, Facebook), radio lokal, *running text* TV Nasional, *Google Display Network*, *Filler Blast*.
- b) Pelayanan dan antisipasi kerumunan dari *weekend banking*, kunjungan oleh petugas BRI, pengguna *E-channel* BRI.
- c) Perbedaan database melalui rekonsiliasi aktif dengan kemenkop dan UKM, *patching* data atas persetujuan kemenkop dan UKM.
- d) Upaya percepatan pencairan BPUM melalui kolaborasi dengan pengusul setempat agar penerima BPUM dihubungi dan segera mencairkan dana BPUM.

f. Inovasi BRI

Terkait Inovasi BRI melakukan strategi dalam mendorong UMKM bangkit melalui 2 pendekatan yakni *Go Higher (Clustering/Ekosisistem, Kemitraan & Go Global)* & *Go Online (Marketplace & Online Market)*. Kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2020 BRI Jawa Tengah sudah mendirikan rumah BUMN Demak, rumah BUMN Pekalongan, rumah BUMN Semarang dan Pengusaha muda Brilian.

g. Sinergi PT BRI (Persero) Tbk dengan Pemerintah

Sinergi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau dengan lembaga pemerintah lainnya serta dengan mitra terkait yaitu :

- a) Membentuk wadah Forum Komunikasi “UMKM Bangkit” Bersama OJK, IJK, dan Pemprov.
- b) Melakukan pameran UMKM untuk melakukan *business matching*.

- c) Melakukan diskusi interaktif dengan pelaku UMKM.
- d) Bersama Jamkrindo, Askkrindo dan Asuransi Perusahaan Anak perihal penjaminan UMKM.
- e) Pemberian beasiswa untuk para pelajar yang melakukan *School From Home* (Sekolah Daring).

2. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

a. Tujuan Program BPUM

Bantuan Produktif usaha mikro berupa hibah modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan, baik KUR maupun pinjaman modal kerja dan investasi lain dari perbankan agar usaha mikro bangkit kembali di masa pandemi COVID-19. Bantuan ini akan melengkapi insentif yang sebelumnya sudah diberikan oleh pemerintah untuk UMKM yang mendapatkan pembiayaan perbankan (subsidi bunga, insentif pajak UMKM, penjaminan kredit modal kerja baru untuk UMKM, serta penempatan dana di bank umum). Program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran Rp22 triliun.

Sumber data yang akan digunakan terutama dari Dinas Koperasi dan UKM, Koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, OJK, Himbara, Perusahaan Pembiayaan Pemerintah (BUMN), dan BLU. Terkumpul 17,23 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari kementerian/lembaga, Dinas Koperasi dan UKM selindo, Koperasi, LKM, himbara (BRI dan BNI, BUMN (PNM dan PT. PEGADAIAN) dan lainnya, selanjutnya dilakukan validasi di Kementerian Koperasi dan UKM.

b. Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah

Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, antara lain:

- a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, PNM, Pegadaian, Koperasi, Bank Wakaf Mikro dan BRI sebagai lembaga pengusul.

Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dimulai sejak Kementerian Koperasi dan UKM mensosialisasikan mengenai program BPUM kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi melalui surat resmi maupun melalui zoom meeting. Selain itu dilakukan penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Provinsi/DI, terdiri dari 8 (delapan) orang per provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan kegiatan BPUM dengan pihak terkait di wilayah Kabupaten/Kota dan Pusat, sosialisasi kegiatan BPUM, serta membantu verifikasi terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi.

- b) Bank BRI serta Bank BNI sebagai Bank penyalur bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM antara lain dengan melaksanakan rapat rutin setiap hari senin dalam rangka percepatan penyaluran dan rekonsiliasi data BPUM.
 - Kementerian Keuangan dalam proses verifikasi dan validasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
 - OJK dalam proses verifikasi dan validasi di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
 - BPKP mengawal semua proses sejak pengajuan usulan, pemeriksaan data, verifikasi calon penerima bantuan, dan juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BPUM di 34 Provinsi.

- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan survei monitoring terhadap program BPUM di 12 Provinsi.
- BPK juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyaluran Banpres tepat sasaran dan tatakelola pelaksanaan yang benar.

c. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi: Ketidaksediaan data UMKM terkini yang sesuai dengan kriteria penerima BPUM. Sedangkan dari kendala dalam rangka meningkatkan performa keberadaan usaha kecil dan menengah (UMKM) khususnya di Jawa Tengah yaitu :

- a) Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya:
 - 94% UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya
 - 90% UMK tidak menggunakan internet
- b) Akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah:
 - 88% UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit
 - Rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan sebesar 20%
- c) Rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan adalah 93% UMK tidak menjalin kemitraan

d. Pendampingan kepada penerima Bantuan

Terkait dengan Pendampingan yang akan diberikan kepada pemerintah terhadap penerima bantuan di Tahun 2020, untuk saat ini belum dilakukan pendampingan karena belum masuk pada anggaran

program. Akan tetapi, Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah untuk memastikan bahwa penerima BPUM benar-benar memiliki usaha. Hal ini sangat penting agar penerima manfaat bantuan dari Pemerintah ini benar-benar tepat sasaran. Jika program BPUM dilanjutkan maka akan dianggarkan untuk kegiatan pendampingan terhadap penerima BPUM.

G. REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada PT BRI (Persero) Tbk dan Kementerian Koperasi dan UKM pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak PT BRI (Persero) Tbk terkait Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) khususnya di zona regional Jawa Tengah.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT BRI (Persero) Tbk untuk mempunyai database UMKM yang akurat sehingga dari Kemenkop tidak perlu memvalidasi data ulang dengan begitu pemerintah cepat dalam mengambil kebijakan dalam penyalurannya.
3. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) memberikan informasi dengan jelas terkait pengambilan data pengusul program BPUM saat ini berjalan dan Proses verifikasi dengan lengkap.
4. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) memberikan kesempatan untuk diverifikasi ulang penerima bantuan yang tidak lolos dikarenakan ketidaklengkapan administrasi.
5. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) agar memberikan data presentasinya dan pemetaan yang jelas terkait program Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah disalurkan di semua kabupaten/kota Jawa Tengah baik daerah yang mudah dijangkau atau daerah terdalam.

6. Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM disarankan harus ada sistem yang harus dievaluasi karena terbukti dilapangan terkait data yang masuk masih ada kesalahan dari teknis seperti kesalahan nama yang berbeda dari data sipenerima.
7. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) agar lebih aktif lagi mensosialisasikan kemasyarakat dengan lengkap dan jelas terkait program Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini khususnya di Jawa Tengah.
8. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) Perlu adanya pertimbangan dalam salah satu syarat penerima program Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terkait tidak ada hutang di bank.
9. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) untuk memberikan atau memvalidasi data calon penerima bantuan benar-benar UMKM yang layak dibantu prioritas UMKM yang sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah.
10. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) lebih memperhatikan strategi penyaluran bantuan yang mudah diakses disemua tempat terutama daerah yang ada dipedalaman Provinsi Jawa Tengah.
11. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membijaksanai UMKM yang mau memulai usahanya lagi karena sangat terdampak dari Pandemi tetapi memiliki KUR agar bisa jadi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini.
12. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) terkait penyalurannya jangan melalui aparaturnya desa atau kelompok-kelompok masyarakat agar tidak terkena calo.
13. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) untuk membangun rumah kreasi, sinergi dengan program pemerintahan pusat terkait pengembangan kawasan pariwisata nasional bagi usaha mikro.

14. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk Meningkatkan daya beli sebagai salah satu cara untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan daya ungkit kepada penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk dibelanjakan atau dijadikan modal kerja.

**KETUA TIM KUNKER KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

TTD.

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.

A – 352

H. DOKUMENTASI KEGIATAN

